

Title : Pendekatan *Movement* Sebagai Konsep Pendidikan Berkemajuan
Muhammadiyah

Author(s) : Beta Pujangga Mukti

Institution : Universiti Sains Malaysia

Category : Article, Competition

Topics : Education

PENDEKATAN *MOVEMENT* SEBAGAI KONSEP PENDIDIKAN BERKEMAJUAN MUHAMMADIYAH

Oleh: Beta Pujangga Mukti¹

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan topik utama dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa selalu aktual untuk dibicarakan, serta dituntut untuk selalu relevan dengan kontinuitas dinamika kehidupan masyarakat. Proses pendidikan tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan manusia yang berkualitas itu sendiri dapat dilihat dari segi pendidikannya (Hamalik, 2014).

Berangkat dari keyakinan bahwa masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, maka peranan sistem pendidikan nasional dalam kehidupan suatu bangsa menjadi sangat dominan. Oleh sebab itu, pendidikan nasional harus selalu ditata agar benar-benar dapat menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas (Wahjoetomo, 1993).

Sekolah merupakan salah satu wahana yang dijadikan tempat untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sekolah yang diharapkan merupakan sekolah yang unggul, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Ketika sekolah tersebut dilihat dari segi kualitasnya unggul, infrastruktur bangunannya bagus, fasilitas sekolah yang memadai, serta para tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya, maka akan tercetak anak-anak didik yang unggul dan berkualitas. Begitu juga ketika dilihat dari segi kuantitasnya, semakin banyak jumlah sekolah yang tersedia, maka akan semakin banyak pula anak-anak usia sekolah yang tertampung dan mempunyai akses untuk melanjutkan sekolah, mengenyam pendidikan, dan merasakan duduk di bangku sekolah.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah sekolah di Indonesia saat ini masih sangat minim. Jumlah Sekolah Dasar dengan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas tidak sebanding. Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin sedikit jumlahnya. Hal ini yang menyebabkan banyak anak putus sekolah di tengah jalan. Masalah yang lain adalah faktor ketidakadilan yang berdampak terhadap rendahnya mutu pendidikan. Terjadinya berbagai gejala

¹ Mahasiswa Master di Pusat Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV) USM

ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan dapat dijelaskan oleh teori “*dual system*” (Windham, 1990). Masyarakat seolah terpecah menjadi dua segmen yang terpisah, yaitu segmen miskin (*disadvantages*) dan segmen kaya (*advantages*). Yang kaya mendapatkan berbagai kemudahan dalam akses pendidikan, sedangkan yang miskin semakin tertinggal karena kurangnya fasilitas dan akses layanan pendidikan (Suryadi, 2014).

Masalah-masalah di atas timbul bukan tanpa sebab. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya adalah masalah pengambilan kebijakan. Dewasa ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan lebih cenderung menggunakan pendekatan program (*programmatic*), yaitu menekankan bahwa seluruh masalah pendidikan di Indonesia diselesaikan oleh pemerintah. Sedangkan lembaga-lembaga swasta yang ingin membantu dalam bidang pendidikan kurang diberikan ruang yang cukup oleh pemerintah untuk ikut dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia (Baswedan, 2013).

Dalam bidang politik, kita melihat telah dimatikannya kehidupan demokrasi. Demokrasi yang menjamin pluralitas atau kemajemukan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakui keunikan kemajemukan dan perbedaan pendapat telah dimatikan sedemikian rupa. Dengan demikian, kehidupan bersama berdasarkan dialog dan tukar pikiran telah dikubur, sehingga usaha untuk memecahkan persoalan bersama telah diganti dengan cara-cara pemaksaan melalui berbagai instruksi atau peraturan dari penguasa. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menentukan berbagai kebijakan baik di dalam kehidupan bersama maupun di dalam pemerintahan semakin lama semakin sempit. Masyarakat menjadi apatis, tidak kreatif dan inovatif, selalu menunggu petunjuk, serba *juklak* (petunjuk pelaksanaan) dan *juknis* (petunjuk teknis), dan berfikir procedural (Hasbullah, 2015).

Dampak dari pendekatan program yang dipilih oleh pemerintah adalah masalah pendidikan tidak akan kunjung menemui titik terangnya. Persoalan mengenai akses layanan sekolah, baik berupa ketersediaan jumlah sekolah, infrastruktur sekolah, sarana dan prasarana sekolah, ketersediaan guru-guru profesional dan lain sebagainya. Hal ini diakibatkan karena pemerintah kurang memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk terlibat menyelesaikan masalah-masalah pendidikan tersebut. Jika masyarakat diberikan ruang untuk terlibat, diberikan wadah sekaligus bantuan moril maupun materil, maka akan banyak orang maupun komunitas yang

berinisiatif membangun sekolah, menjadi guru profesional, menyediakan bantuan sarana dan prasarana sekolah dan sebagainya.

Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* (pembaruan) telah mengusung ide dan gagasan transformasi sosial keagamaan dalam segala bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah adalah pelopor dan perintis pendidikan di negeri ini jauh sejak sebelum kemerdekaan, hingga kini terus berkembang ke sudut-sudut Nusantara. Pendidikan dalam arti luas adalah nafas utama gerakan ini, hingga pelosok Jayapura pun bendera matahari bercahaya 12 dengan simbol bangku sekolahnya berkibar-berbinar (Majelis Diktilitbang, 2010).

Faktor penyebab utama keberhasilan Muhammadiyah dalam membangun kualitas dan kuantitas pendidikan di negeri ini adalah dengan semangat gerakan (*movement*) yang dimiliki setiap warganya. Dengan semangat gerakan ini, lahirlah rasa kepemilikan (*ownership*) dalam diri mereka, sehingga mereka merasa memiliki masalah dan harus ikut turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu masalah utama di negeri ini adalah masalah pendidikan. Dengan semangat gerakan dari para warga Muhammadiyah, maka lahirlah sekolah-sekolah Muhammadiyah hingga ke pelosok-pelosok negeri. Hal ini sebagai wujud sumbangsih Muhammadiyah kepada negeri ini dalam rangka mewujudkan amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Muhammadiyah memilih konsep dengan pendekatan gerakan (*movement*) sebagai bentuk pendidikan yang berkemajuan. Sudah saatnya pendidikan yang berkemajuan bukan lagi bersifat otoriter, seolah-olah masalah pendidikan hanya diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat tidak boleh ikut campur mengurusinya. Namun pendidikan yang berkemajuan adalah bersifat gerakan (*movement*), melibatkan seluruh elemen masyarakat, lembaga, komunitas, dan semua kalangan untuk bergerak bersama menyelesaikan dan menuntaskan masalah pendidikan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam yang menekankan perbaikan hidup beragama dengan menggiatkan amal-amal dalam bidang pendidikan dan sosial. Dalam pendidikan, dewasa ini pendidikan Muhammadiyah sudah berusia lebih dari satu abad, karena pendidikan Muhammadiyah bisa disebut sebagai cikal bakal berdirinya organisasi Muhammadiyah. Usia pendidikan Muhammadiyah jelas lebih tua dari usia pendidikan nasional. Diukur pada zamanya, apa yang dilakukan oleh KHA Dahlan dengan pendidikan Muhammadiyah merupakan suatu

reformasi pendidikan yang mendasar. Sehingga sejarah mencatat, jejak pembaruan Kiai Dahlan paling besar adalah tumbuhnya tradisi *learning society* atau masyarakat pembelajar yang meletakkan ibadah dalam fungsi dan dimensi sosial.

Tidak kalah penting adalah pesan KHA Dahlan yang sangat fenomenal, “Hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah” merupakan pesan yang memberikan ruh semangat kepada setiap warga Muhammadiyah untuk tidak pernah lelah berjuang di Muhammadiyah dalam bidang keagamaan, sosial, maupun pendidikan. Hal ini terlihat dari begitu masifnya amal usaha Muhammadiyah yang sudah berdiri hingga ke pelosok negeri. Dalam bidang pendidikan, hingga tahun 2015, tercatat Muhammadiyah sudah membangun sebanyak 5.264 sekolah di seluruh Indonesia. Jumlah ini meliputi SD, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan pondok pesantren. Data tersebut belum termasuk 177 perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh semangat gerakan (*movement*) dari para warga Muhammadiyah untuk terus menghidup-hidupi Muhammadiyah.

Dalam kehidupan bernegara, secara konstitusional menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Namun secara moral adalah tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Dewasa ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang pendidikan merupakan tanggung jawab secara moral dalam rangka ikut membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia, terutama ikut terlibat melunasi janji kemerdekaan yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melihat masalah pendidikan di Indonesia yang begitu kompleks, maka dibutuhkan satu kebijakan dengan pendekatan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ada dua pendekatan dalam gerakan sosial, yaitu program (*programmatic*) dan gerakan (*movement*). Kedua pendekatan ini bukan dalam artian ketat, harus memiliki sejumlah syarat atau harus memenuhi berbagai kondisi (Anis Banskwan, 2013). Dewasa ini, hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah lebih cenderung menerapkan kebijakan pendekatan program daripada pendekatan gerakan. Sedangkan Muhammadiyah mengambil satu pendekatan yang berbeda dalam kebijakannya, yaitu dengan pendekatan gerakan. Untuk lebih jelasnya, akan dibahas mengenai dua model pendekatan dalam kebijakan.

Kebijakan Pendekatan *Programmatic*

Kebijakan pendekatan *programmatic* cenderung sama dengan *Man-Power Approach*. Pendekatan jenis ini lebih menitikberatkan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional dalam rangka menciptakan ketersediaan sumberdaya manusia (*human resources*) yang memadai di masyarakat. Pendekatan ini tidak melihat apakah ada permintaan dari masyarakat atau tidak, tetapi yang terpenting adalah menurut pertimbangan-pertimbangan rasional dan visioner dari sudut pandang pengambil kebijakan.

Pemerintah sebagai pemimpin yang berwenang merumuskan suatu kebijakan memiliki legitimasi kuat untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Dapat dipetik aspek penting dari pendekatan jenis kedua ini adalah, bahwa secara umum lebih bersifat otoriter. Kebijakan dengan pendekatan ini telah terjadi sejak masa Orde Baru. Rezim Orde Baru yang otoriter telah melahirkan sistem pendidikan yang tidak mampu melakukan pemberdayaan masyarakat secara efektif, meskipun secara kuantitatif rezim ini memang telah mampu menunjukkan prestasi yang cukup baik di bidang pendidikan. Kemajuan-kemajuan pendidikan secara kuantitatif kita rasakan selama Orde Baru berkuasa.

Sebagai contoh, data statistik yang dikemukakan oleh Abbas (2000) menunjukkan bahwa jumlah murid pada tingkat SD meningkat dari 13.023.000 pada tahun 1967/1968 menjadi 29.239.238 dalam tahun 1997/1998, atau telah terjadi peningkatan sebesar 224,59%. Dalam periode yang sama, murid SLTP telah meningkat dari 1.000.000 menjadi 9.227.891 atau terjadi peningkatan sebesar 902,30%. Demikian pula pada tingkat SLTA, jumlah pendaftar telah meningkat dari 500.000 menjadi 4.932.083 atau meningkat sekitar 1000%. Peningkatan yang berarti juga terjadi pada tingkat universitas. Dalam periode yang sama, jumlah mahasiswa telah meningkat dari 230.000 menjadi 2.703.896 atau meningkat 1.176%.

Namun demikian, pemberdayaan masyarakat secara luas, sebagai cermin dari keberhasilan itu, tidak pernah terjadi. Mengapa demikian, karena Orde Baru setelah lima tahun pertama berkuasa, secara sistematis telah menyiapkan skenario pemerintahan yang memiliki visi dan misi utama untuk melestarikan kekuasaan dengan berbagai cara dan metode. Akibatnya, sistem pendidikan kemudian dijadikan sebagai salah satu instrument untuk menciptakan *safety net* bagi pelestarian kekuasaan. Visi dan misi pelestarian kekuasaan itu melahirkan kebijakan pendidikan yang bersifat *straight jacket* (Suyanto, 2000).

Kebijakan Pendekatan *Movement*

Kebijakan *movement* bisa diartikan sama dengan kebijakan *Social Demand Approach*. Yaitu suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat.

Di Negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintah dibuat dari, oleh dan untuk rakyat. Kebijakan-kebijakan negaranya, termasuk kebijakan pendidikannya, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di Negara tersebut, juga berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan bukanlah jargon baru lagi. Ia adalah suatu keniscayaan. Sehingga masyarakat memiliki *ownership* (kepemilikan) terhadap masalah kebijakan pendidikan, yang lebih tahu masalah yang dihadapi.

Hal ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989. Salah satu isu penting dalam undang-undang tersebut adalah pelibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pernyataan pada Pasal 4 Ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan (Rosyada, 2007).

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan, tidak saja sekedar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahnya, melainkan yang juga tak kalah penting adalah kebijakan tersebut hendaknya dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijakan-kebijakan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan. Partisipasi adalah suatu *term* yang menunjuk kepada keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan pendidikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Dalam sistem pemerintahan yang *top down*, partisipasi masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan tidak begitu dipermasalahkan; tetapi pada sistem

pemerintahan yang *bottom up*, tingginya partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai indikasi sukses tidaknya suatu kebijakan (Imron, 2002).

Miftah Toha (1984) menggolongkan partisipasi masyarakat ke dalam tiga golongan, yaitu: (1) partisipasi mandiri, yang merupakan usaha berperan serta yang dilakukan secara mandiri oleh pelakunya, (2) partisipasi mobilisasi (3) partisipasi seremoni.

Masalah partisipasi masyarakat timbul disebabkan karena pendidikan harus diintegrasikan dengan pembangunan masyarakat. Disamping itu, masalah ini timbul juga oleh karena di Indonesia terdapat lembaga-lembaga pendidikan swasta. Sementara itu secara prinsipil ditegaskan bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat kiranya harus dikaitkan dengan seluruh pola pendidikan nasional yang meliputi tujuan, struktur, kurikulum, organisasi dan administrasi serta pembiayaan (Priyono & Pranaka, 1979).

Adanya kebijakan gerakan (*movement*) ini memunculkan paradigma demokratisasi dalam pendidikan. Semua upaya demokratisasi tidak akan efektif membawa berbagai perubahan tanpa didukung dengan pola pengelolaan sekolah yang sesuai. Oleh sebab itu, model manajemen yang harus dikembangkan dalam konteks demokratisasi sekolah adalah manajemen yang demokratis, yang memperbesar pelibatan *teamwork* dalam proses pengambilan putusan, perencanaan program, pendistribusian tugas dan wewenang, serta perubahan paradigma dalam menilai produktivitas kerja setiap unsur dalam organisasi sekolah, dengan orientasi kepuasan pelanggan (Rosyada, 2007).

Sistem pendidikan nasional yang telah mematikan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat perlu diubah antara lain, dengan melihat kembali lembaga-lembaga pendidikan agar merupakan suatu bagian dari *good governance*. Hal ini berarti lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, haruslah berada dalam organisasi yang transparan serta mengikutsertakan masyarakat yang memilikinya. Dengan demikian, pendidikan merupakan bagian dari proses demokratisasi dalam masyarakat Indonesia (Tilaar, 2009).

Dari kedua pendekatan kebijakan tersebut di atas, Muhammadiyah lebih cenderung kepada pendekatan gerakan (*movement*) dalam memainkan perannya untuk membantu pemerintah menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Karena pendekatan inilah yang dianggap lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini. Sekarang bukan lagi zaman dimana masalah pendidikan di Indonesia hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, namun masyarakat secara luas

juga mempunyai tanggung jawab secara moral untuk ikut terlibat menyelesaikan masalah tersebut. Sejak awal didirikannya, Muhammadiyah mempunyai ruh semangat gerakan yang terus digulirkan sebagai nafas pergerakan dan perjuangan Muhammadiyah dalam upaya menciptakan Islam yang berkemajuan. Hal ini terlihat dari berhasilnya Muhammadiyah dalam memajukan berbagai bidang, baik keagamaan, sosial dan terutama bidang pendidikan. Upaya ini akan terus dilakukan Muhammadiyah untuk menciptakan pendidikan berkemajuan.

Konsep pendidikan berkemajuan menurut Muhammadiyah adalah bukan lagi bersifat otoriter melainkan harus demokratis. Artinya pemerintah tidak bisa menganggap bahwa masalah pendidikan hanya bisa diselesaikan dengan cara dan peraturan pemerintah. Tanpa memberikan ruang yang cukup kepada masyarakat untuk mengambil peran secara langsung maupun tidak langsung. Dewasa ini pemerintah sudah saatnya memberikan wadah sekaligus dukungan secara moral dan materil kepada masyarakat, lembaga, dan komunitas untuk bersama-sama menuntaskan masalah pendidikan di Indonesia.

Kita tidak sedang membicarakan mana yang lebih efektif antara kebijakan pendekatan program atau pendekatan gerakan, karena keduanya memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Namun kita ingin mencari titik temu di antara kedua pendekatan tersebut. Bahwa kedua pendekatan tersebut harus berjalan beriringan dan tidak bias berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah dan Muhammadiyah sebagai mitra penting bagi kemajuan masa depan pendidikan di Indonesia, dewasa ini pengembangan di dunia pendidikan tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah atau Muhammadiyah secara sendiri-sendiri, akan tetapi menuntut adanya kemitraan antara keduanya.

Oleh karena itu, Pemerintah dan Muhammadiyah harus menjadi mitra yang baik, bukan justru menafikan atau meniadakan satu sama lain. Dua pendekatan kebijakan tersebut sudah mempunyai porsi dan tugas masing-masing. Namun tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus ada kerjasama yang baik di antara keduanya. Kebijakan dengan pendekatan *programmatic* bisa efektif jika pemerintah berkomitmen menempatkan masalah pendidikan sebagai masalah utama dibanding masalah-masalah yang lain. Selain itu pemerintah juga harus mulai membangun paradigma demokratis terhadap dunia pendidikan.

Begitu juga dengan kebijakan pendekatan *movement*, dapat berjalan efektif jika masyarakat secara umum dan dalam hal ini Muhammadiyah secara khusus memiliki *ownership* terhadap masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di Indonesia sangat kompleks, kita tidak bisa

terus menerus menuntut pemerintah, yang perlu dilakukan adalah bersama-sama mengajak semua orang untuk terlibat berkontribusi menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia.

Muhammadiyah dengan semangat gerakannya, telah melakukan transformasi besar dalam dunia pendidikan. Ciri utamanya adalah dengan melibatkan peran masyarakat atau warganya untuk bersama-sama membangun dan memajukan pendidikan bangsa sehingga terwujudlah pendidikan Indonesia yang berkemajuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa: (a) Muhammadiyah adalah gerakan *tajdid* (pembaharuan) yang telah melakukan transformasi di segala bidang, dalam bidang keagamaan, sosial dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah adalah pelopor dan perintis pendidikan di negeri ini jauh sejak sebelum kemerdekaan, hingga kini terus berkembang ke sudut-sudut Nusantara. (b) faktor utama keberhasilan Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan adalah dengan memilih pendekatan gerakan (*movement*), yaitu melibatkan semua warga masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. (c) ada dua pendekatan dalam gerakan sosial, yaitu program (*programmatic*) dan gerakan (*movement*). Pendekatan program (*programmatic*) sama dengan *Man-Power Approach*. Pendekatan ini kurang memperhatikan keterlibatan dari masyarakat dan pendekatan ini lebih cenderung otoriter. Sedangkan pendekatan gerakan (*movement*) sama dengan *Social Demand Approach*. Yaitu suatu pendekatan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang mendasarkan diri pada aspirasi, tuntutan, serta aneka kepentingan yang didesakkan oleh masyarakat. (d) konsep pendidikan berkemajuan Muhammadiyah adalah dengan pendekatan gerakan (*movement*), karena konsep pendidikan berkemajuan bukan lagi bersifat otoriter melainkan sudah saatnya bersifat demokratis, dengan melibatkan peran masyarakat secara umum. (e) dalam hal ini pemerintah dan juga Muhammadiyah harus menjadi mitra yang baik, bukan justru menafikan atau meniadakan satu sama lain. Dua pendekatan kebijakan tersebut sudah mempunyai porsi dan tugas masing-masing. Namun tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus ada kerjasama yang baik di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, dalam Suyanto, Djihad Hisyam. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Baswedan, Anis, *Menjawab Tantangan Masa Depan Pendidikan Indonesia*, PPI Kobe, Jepang 16 Januari 2013.
- Hamalik, Oemar, 2014. *Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasbullah, Muhammad, 2015. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Imron, Ali, 2002. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia; Proses, Produk, dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, 2010. *1 Abad Muhammadiyah; Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta: Kompas.
- Rohman, Arif & Teguh Wiyono, 2010. *Educational Policy In Desentralization Era*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rosyada, Dede, 2007. *Paradigma Pendidikan Demokrasi; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Suryadi, Ace, 2014. *Pendidikan Indonesia Menuju 2025; Outlook: Permasalahan, Tantangan & Alternatif Kebijakan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, Djihad Hisyam. 2000. *Refleksi dan Reformasi Pendidikan Di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Tilaar, H.A.R., 2009. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Toha, Miftah, 1984. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press.
- Onny S. Prijono & A.M.W. Pranarka, 1979. *Situasi Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: CSIS.
- Wahjoetomo, 1993. *Regulasi Pendidikan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Windham, Douglas, Prof. Ph.D. & Henry Levin, Prof. Ph.D., 1990. *The Analysis of Educational Productivity: Issues in Macro Analytical Perspective*, London, New York: Ballinger Publishing Company.